

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**NISRINA WIDAYUNI
NIM. 12030110120079**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nisrina Widayuni
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120079
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR – FAKTOR**
YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL*
***RESPONSIBILITY* PADA PERBANKAN**
SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA
Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt

Semarang, 5 Maret 2014

Dosen Pembimbing

(Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D)

NIP. 19750527 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nisrina Widayuni
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120079
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 20 Maret 2014

Tim Penguji :

1. Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt., (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nisrina Widayuni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Nisrina Widayuni

NIM. 12030110120079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

So verily, with the hardship, there is relief [94:5]

“What people call a ‘Luck’ is not a Luck. It’s Allah’s Will.”

(Khadimul Quran, wisdom for the seeker)

*“ If PLAN A doesn't work out don't worry,
you still have 25 letters left. ”*

(unknown)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tua saya,

Sri Sudartono dan Rr. Eni Endah Hayati

serta adik saya Tantonni Bemasaji

yang telah dipersatukan Allah dalam ikatan keluarga.

Terima kasih pula untuk sahabat dan kerabat

yang selalu ada dan setia dengan dukungannya.

Terima kasih untuk sederet upaya

dan berbait-bait doa

yang telah bersedia dikirimkan ke langitNya.

ABSTRACT

In Islamic banks, the disclosure aspect of corporate social responsibility is a form of obedience to Islamic law because it shows the benefits that the company provides to its environment. Accordingly, this study aims to determine the factors that may affect the disclosure of corporate social responsibility (CSR) in Islamic banks in Indonesia and Malaysia. The factors that used in this study are the number of sharia supervisory board meeting, the number of sharia supervisory board members, profitability, leverage and firm size .

This study used 36 annual reports of Islamic banks in Indonesia and Malaysia in the period 2010-2012 as samples. The samples are obtained using a purposive sampling method. The measurement of corporate social responsibility disclosure using an index with 32 aspects of the disclosure of which is a replication of the research from Maali et al. (2003). Beside of that, the variables in this study tested using the multiple regression analysis with SmartPLS.

From this study we can see that the disclosure of corporate social responsibility on Islamic banking both in Indonesia and Malaysia are quite low. The results showed that profitability has a positive effect, while leverage has a negative effect on the level of disclosure of corporate social responsibility. Meanwhile, the number of sharia supervisory board meetings , the number of sharia supervisory board members and the size of the company do not have a significant effect .

Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR) , Islamic banks , the number of sharia supervisory board meeting , the number of sharia supervisory board members , profitability , leverage , size of the company .

ABSTRAK

Pada bank syariah, aspek pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariah Islam karena menunjukkan manfaat yang diberikan perusahaan kepada lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Faktor-faktor yang diteliti adalah jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, profitabilitas, tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel dari 36 laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2010-2012. Sampel tersebut didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* dilakukan menggunakan indeks dengan 32 aspek pengungkapan yang merupakan replika dari penelitian Maali *et al.* (2003) sedangkan pengujian variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan SmartPLS.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia masih cukup rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif sedangkan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara itu, variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), bank syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA”** dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagi pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, *The Most Gracious and Merciful*, atas anugerah dan kasih sayang-Nya yang tak pernah putus dan juga janji-Nya yang nyata.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Anis Chariri, SE, MCom, Ph.D. Akt. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang senantiasa memacu semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.d. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai,
6. Bapak Adityawarman, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah membantu dan menjadi teman diskusi dalam berbagai kesempatan.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, terimakasih untuk ilmu bermanfaat dan bantuannya dalam menjalani hari-hari sebagai mahasiswa.

8. Bapak Sri Sudartono, ibu Eni Endah Hayati, dek aji dan keluarga besar tercinta yang senantiasa membantu dan mendukung tak kenal lelah dalam berbagai hal. Terimakasih untuk doa-doa yang telah mengetuk langit-Nya.
9. Sahabat super *Gengges* : Galuh, Saras, Novia, Rina, Intan, Widya, Shabrina, Mentari, Rani, Fierda, Asti, Nurin, Tian, Bulan. *Thanks for the bitter sweet moment we've spent together.* Terima kasih telah ada sebagai paket komplit di setiap situasi. Insya Allah kita sukses bersama. Aamiin.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi Undip 2010 yang hebat, *See you on Top!*
11. Keluarga Mahasiswa Akuntansi, Kelompok Studi Ekonomi Islam, LPM Edents, Tari Jawa, UPK Tari FEB dan Taman Pelangi Diponegoro. Terima kasih untuk segala persahabatan, pengalaman dan pelajaran yang tak ternilai selama ini. *What a wonderful life.*
12. Sahabat super sejak SMP : Ulin, Tiwik dan Nia. *Thanks for a beautiful everlasting friendship.* Terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.
13. Saudara-saudaraku OSIS SMANSA Magelang 07/08/09 : Dwi, Gigih, Yuda, Ryan, Febrianti, Novia, Hida, Agung, Najih, Diana, Fafa, Satya, Anggit. Terima kasih untuk segala canda tawa, bantuan dan pengalaman yang kalian beri. *Glad to know such a great people like you all.*
14. Teman-teman Banjarsari No.2 : mbak Awid, Nia, Restu, Mbak Mita, Mbak Inggit, Mbak Sofi, Mbak Yeni, Elisa, Ratna, Erent, Sakti dkk. Kehidupan kos tidak akan menyenangkan tanpa kalian. Terima kasih untuk hari-hari yang ceria.
15. Teman-teman KKN TIM II 2013 desa Dringo : Fia, Mbak Nuri, Cahya, Isti, Ape, Andre, Mas Fajrin, Mas Adit. *Thanks for the memorable 5 weeks when i was weak. Cheers!*
16. Teman-teman sebinginan : Yahdi, Umi, Kristin, Ani. Terima kasih untuk masukan dan bantuan yang diberikan selama ini. *See you on Top!*
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima Kasih.

Semarang, 5 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Legitimasi	17
2.1.2 Teori Keagenan.....	18
2.1.3 Teori Stakeholder	19
2.1.4 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	20
2.1.4.1 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
2.1.4.2 Pengungkapan <i>CSR</i>	23
2.1.4.3 <i>CSR</i> dalam Perspektif Islam	25
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Perumusan Hipotesis	33
2.4.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>CSR</i>	33
2.4.2 Pengaruh Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>CSR</i>	34

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR	35
2.4.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap CSR	36
2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap CSR	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	39
3.1.1 Variabel Dependen	39
3.1.2 Variabel Independen	41
3.1.3 Variabel Kontrol	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Metode Analisis	45
3.5.1 Analisis Deskriptif	45
3.5.2 Pengujian Hipotesis	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.1.1 Sampel Penelitian	53
4.1.2 Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	54
4.2 Analisis Data	55
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	55
4.2.2 Hasil Uji Hipotesis	58
4.2.2.1 Koefisien Determinasi R^2	58
4.2.2.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	59
4.2.3 Pengujian Hipotesis	60
4.2.3.1 Pengujian Hipotesis I	60
4.2.3.2 Pengujian Hipotesis II	61
4.2.3.3 Pengujian Hipotesis III	61
4.2.3.4 Pengujian Hipotesis IV	61
4.2.3.5 Pengujian Hipotesis V	62
4.3 Interpretasi Hasil	63
4.3.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	63
4.3.2 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	65
4.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	66
4.3.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	67
4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	68

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	72
5.3 Saran Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1. Kriteria Penelitian PLS	51
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>R square</i> (R^2).....	58
Tabel 4.4 Hasil Uji statistik t.....	60
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Aset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	2
Gambar 1.1. Aset Bank Syariah dengan Pertumbuhan Pasar yang Cepat.....	3
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	33
Gambar 3.1. Rancangan Model Struktural.....	47
Gambar 4.1. <i>Output Bootstrapping</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, terdapat rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, manfaat, dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan. Penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mementingkan laba, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas usahanya. Maali *et al.* (2003) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang mengikuti syariah Islam di transaksi bisnis mereka. Syariah mengharuskan transaksi menjadi sah (halal) dan melarang transaksi yang melibatkan bunga dan spekulasi. Usmani (2002) dalam Farook (2011) menjelaskan bahwa filosofi di balik perbankan Islam bertujuan untuk membentuk distribusi keadilan bebas dari segala macam eksploitasi.

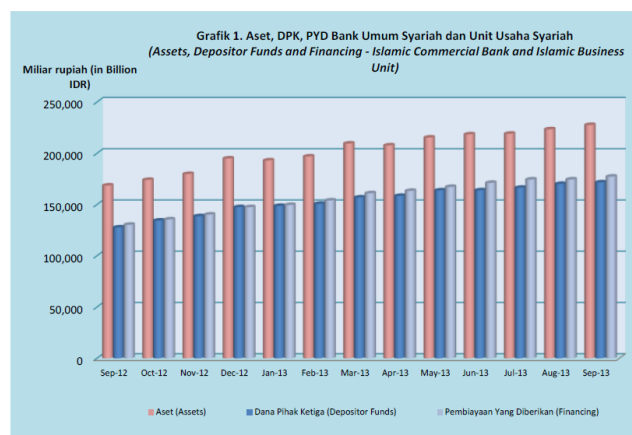
Meskipun tumbuh dengan baik, sistem perbankan syariah di kedua negara ini masih terbilang baru dibandingkan dengan sistem konvensional yang telah lebih dulu diterapkan. Terdapat beberapa aspek yang seringkali menjadi sorotan

mengenai kesesuaian aktivitas perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek tersebut adalah aktivitas sosial perbankan syariah terhadap lingkungannya.

Di Indonesia terdapat 10 Bank Syariah yang dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu bank swasta nasional devisa, bank swasta nasional nondevisa dan bank campuran. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekia Muslim menjadi awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat diikuti oleh Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah yang juga menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat cenderung mengalami peningkatan tiap tahun seperti yang ditampilkan pada gambar 1.1 mengenai aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Gambar 1.1

Aset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

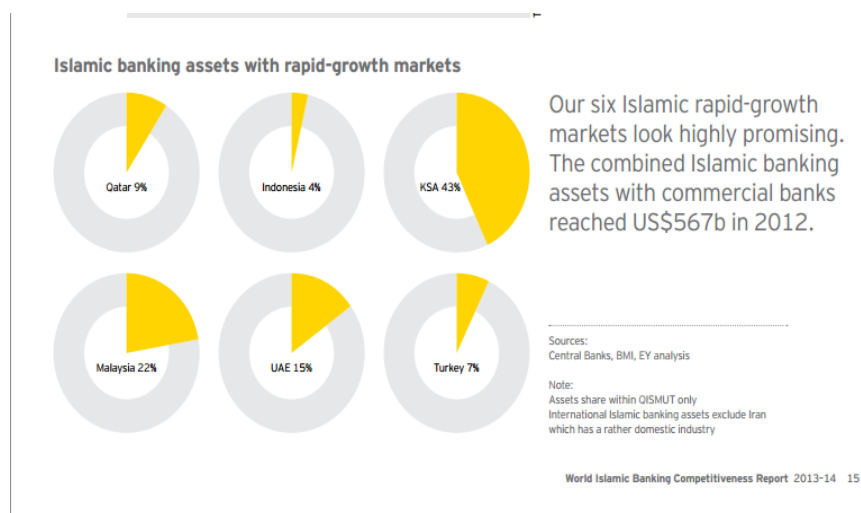


Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, September 2013, hal 52

Dalam *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013*, Ernst & Young menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 250 juta dan prospek ekonomi yang positif serta stabil, Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan pasar berikutnya bagi perbankan Islam. Sedangkan pada *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*, Ernst & Young menjelaskan bahwa banyak bank syariah asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia meskipun Indonesia memiliki proses yang lambat dalam hal peraturan dan pertimbangan hukum. Dalam laporan tersebut Ernst & Young juga menyatakan bahwa terdapat 6 negara yang memiliki potensi besar dalam perkembangan keuangan syariah secara global. Enam negara tersebut adalah Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki yang kemudian disebut dengan QISMUT.

Gambar 1.2

Aset Bank Syariah dengan Pertumbuhan Pasar yang Cepat



Sumber : Ernst & Young, *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*, hal 15

Dalam gambar 1.2 terlihat bahwa Malaysia memiliki aset perbankan syariah sebesar 22% pada pasar keuangan syariah yang tumbuh dengan pesat. Malaysia lebih unggul daripada Indonesia yang hanya memiliki persentase sebanyak 4% saja. Sejarah menunjukkan bahwa perbankan syariah di Malaysia lebih dahulu berkembang dari pada negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30 persen merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia. Di negeri ini, di samping *full fledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia juga memperkenalkan sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional (Antonio, 2001).

Sistem perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang terbilang pesat perlu diikuti oleh aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh perusahaan. Menurut Usmani (2002) dalam Farook *et al.*(2011), perbankan syariah tidak dapat terlepas dari kewajibannya dalam mematuhi syariah Islam. Menurut Prinsip-prinsip Islam, transaksi bisnis tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat maupun lingkungan yang telah ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank syariah memiliki identitas etika seperti yang dinyatakan

pula oleh Haniffa dan Hudaib (2007). Etika ini merupakan hal yang perlu dipegang teguh dan diterapkan oleh bank syariah.

Keraf (1991) dalam Solihin (2009) memaparkan bahwa etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang hidup secara baik sebagai manusia. Pengetahuan mengenai perilaku yang baik dan buruk tersebut dapat berasal dari agama. Pada perbankan syariah hal tersebut diatur dalam prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bank syariah dalam penerapan etika adalah dengan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Situs Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) mendefinisikan bahwa kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela

untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

Pengungkapan CSR ini merupakan penerapan dari teori legitimasi yang menjadi alat bagi perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan sebagai wujud akuntabilitas. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Yasin *et al.* (2013) menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan utama CSR dalam ISO 26000 adalah memaksimalkan kontribusi perusahaan untuk pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Perkembangan ini bukan hanya ditunjukkan untuk internal perusahaan semata, tetapi juga untuk faktor eksternal perusahaan yakni masyarakat dan lingkungan sekitar.

Baik Indonesia maupun Malaysia menerapkan konsep CSR dalam negaranya masing-masing. Akan tetapi, kedua negara ini memiliki kebijakan yang

berbeda dalam mengatur penerapan pengungkapan CSR. Yasin *et al.* (2013) menjelaskan bahwa kegiatan CSR di Indonesia berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Konsep CSR diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan berlakunya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 UU PT. Muatan materi CSR yang diatur dalam UU PT Pasal 74 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL.

Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai TJSL secara lebih ringkas atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Sedangkan pada pasal 4 dijelaskan bahwa berkenaan dengan alokasi dana pelaksanaan program CSR merupakan biaya perusahaan yang program kerja dan anggarannya terlebih dahulu diajukan oleh direksi untuk mendapat persetujuan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Di negara Malaysia menurut Lo dan Yap (2011), pasca-krisis tahun 1998, Malaysia membentuk *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) untuk menangani masalah yang berkaitan dengan transparansi perusahaan, akuntabilitas, dan CSR. Ruth Yap pada <http://www.env.go.jp/earth/coop/eco-csrjapan/en/malaysia.html> menjelaskan bahwa pada tahun 2007, diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk mengungkapkan kegiatan atau praktik CSR mereka. Ide CSR ini didorong lebih jauh karena pemerintah memperkenalkan insentif pajak untuk bisnis yang melaksanakan program CSR secara luas. Pemerintah juga telah membentuk dana sebesar RM50 juta untuk mempromosikan kegiatan CSR dan mengumumkan bahwa di masa yang akan datang masuknya CSR dalam dana investasi milik negara akan menjadi kriteria untuk investasi masa depan. Bisnis yang menerapkan praktek CSR secara baik akan mendapat apresiasi dari pemerintah dengan mendapatkan penghargaan ‘Perdana Menteri CSR Awards’ pada tiap akhir tahun mulai dari tahun 2008. Langkah-langkah pemerintah Malaysia ini telah memfasilitasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi CSR sebagai bagian dari strategi dan nilai-nilai inti perusahaan mereka.

Konsep pengungkapan CSR berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada Bank Syariah, pengungkapan CSR merupakan salah satu aspek yang menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip dan nilai Islam yang menjadi landasan perusahaan. Siwar dan Hossain (2009) dalam Widiawati (2012) menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab

sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini menekankan ketakwaannya pada Allah SWT. Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan berkontribusi terhadap konsep pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Baik perbankan syariah Indonesia maupun Malaysia menggunakan standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai acuan dalam menyusun standar laporan keuangannya. Perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional adalah pada prinsip laporan keuangan syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Vejzagic dalam jurnal yang dipublikasikan oleh Academia.edu menjelaskan tentang peraturan AAOIFI pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

“More specifically, for the Islamic Financial Institutions (IFI), the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2010) suggests that the financial reports of the IFI should provide the information which is useful for users, such as: (i) information about the compliance with the Islamic Shariah and its objectives, (ii) information about economic resources, related obligations and the effects of transactions and other events and circumstances on such economic resources and related obligations, (iii) information to assist the concerned party in the determination of zakah on the funds and the purpose for which it will be disbursed, (iv) information to assist in estimating cash flow that might be realized, the timing of those flows and the risk associated with their realization, (v) information to assist in evaluating the discharge of the fiduciary responsibility to safeguard funds and to invest them at reasonable rates of return, and (vi) information about the discharge of the social responsibilities. Based on discussion above it can be concluded that the framework of the Islamic accounting is founded on the objectives of Shariah in order to establish socioeconomic justice. As a component of Islamic finance system, Islamic accounting develops its objectives which are based on socioeconomic accountability.”

Beberapa peneliti terdahulu melakukan pengujian terhadap kesesuaian praktik perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Hameed dan Yaya

(2003) menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan pengungkapan analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana *zakat* dan penggunaannya, laporan tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Akan tetapi penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua negara belum memenuhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar AAOIFI. Penelitian yang dilakukan oleh Percy dan Stewart (2010) mendapatkan hasil yang serupa bahwa :

“...Corporate Social Responsibility disclosures in annual reports (in the form of disclosure on the Shari’ah Supervisory Board and disclosure on zakat) are still limited.”

Hal tersebut memperlihatkan masih terdapat keterbatasan perbankan syariah dalam melakukan pengungkapan CSR. Penelitian mereka juga menyatakan bahwa perbankan syariah lokal Malaysia lebih melakukan pengungkapan dibandingkan perbankan syariah asing Malaysia.

Sedangkan penelitian Raharja (2011) mendapatkan hasil bahwa bank syariah di Indonesia tidak melakukan pengungkapan informasi tentang kegiatan yang dapat menuai kritik seperti transaksi yang haram atau melanggar hukum. Di sisi lain, bank memberikan pengungkapan yang lebih dalam hal amal mereka dan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Ketidaksesuaian perbankan Islam menerapkan prinsip syariah juga dijelaskan oleh Maali *et al.* (2003) dalam hasil penelitiannya. Terdapat rentang yang cukup lebar dalam pelaporan sosial sukarela bank syariah, dengan beberapa bank melaporkan 35 persen dari pengungkapan

sosial yang diharapkan sementara yang lain hampir tidak mengungkapkan adanya informasi sosial.

Dalam praktik pengungkapan CSR terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006), menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Farook *et al*(2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Determinants of Corporate Social Responsibility disclosure : case of Islamic banks*” menyatakan bahwa tekanan politik dan masyarakat memiliki pengaruh yang negatif sedangkan jumlah populasi muslim dan *Investment Account Holders* memiliki pengaruh yang positif. *Islamic-Governance Score* juga teruji meningkatkan tingkat pengungkapan CSR oleh bank syariah. Rizkiningsih (2012) yang juga mengacu

pada penelitian Farook *et al*(2011) menyatakan bahwa tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap bank syariah untuk melakukan *Islamic Social Reporting*.

Haniffa dan Cooke (2000) menyatakan bahwa dalam hal pengungkapan perusahaan, komposisi dewan merupakan variabel yang menarik untuk dipertimbangkan karena secara tidak langsung akan mencerminkan peran direktur non-eksekutif di papan. Jika mereka benar-benar melaksanakan peran pemantauan mereka daripada 'dirasakan' melakukan peran pemantauan mereka maka dapat diharapkan terjadinya pengungkapan. Dominasi mereka (dalam hal jumlah) dapat memberikan lebih banyak kekuatan untuk memaksa manajemen dalam melakukan pengungkapan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Farook *et al*. (2011) dengan memodifikasi variabel independen yang digunakan. Terdapat 5 variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel IG-SCORE diubah dengan meneliti jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sebagai variabel baru yang akan diteliti adalah profitabilitas, *leverage* dan jumlah rapat dewan pengawas syariah. Dalam penelitian sebelumnya, variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah masih jarang diteliti sehingga dalam penelitian ini akan diuji dengan asumsi bahwa semakin sering diadakannya frekuensi rapat maka kualitas pengungkapan CSR bank syariah dapat lebih baik. Berbeda dengan penelitian Farook *et al*., sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan difokuskan pada perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah jumlah anggota dewan pengawas syariah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah tingkat *leverage* memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat *leverage* terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk :

1. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai ekonomi syariah dan seluk-beluknya khususnya dalam pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perbankan syariah. Hal ini semoga dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih memanfaatkan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

2. Bagi pemerintah diharapkan agar dapat merumuskan atau meregulasi standar pengungkapan laporan tahunan syariah yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.
3. Bagi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengungkapan CSR pada laporan tahunan yang akan disusun.
4. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi mengenai *corporate social responsibility* dalam perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam isi penelitian ini maka sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltiandan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan penjelasan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan secara mendetail mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil sebagai pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dipaparkan simpulan peneliti, keterbatasan, serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, telaah pustaka juga membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antarperusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs 1990; Dowling dan Pfeffer 1975; O'Donovan 2002 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Seringkali terdapat perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakatnya yang disebut dengan *Legitimacy Gap*. Hal

tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dalam melanjutkan kegiatan usahanya.

Warticl dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa legitimacy gap dapat terjadi karena tiga alasan berikut :

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah,
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat (O'Donovan, 2001 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam penelitian ini, teori legitimasi berhubungan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Bentuk kepatuhan ini salah satunya diimplementasikan dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Kontrak kerja terjalin antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-

tugas tertentu bagi prinsipal; prinsipal menutup kontrak untuk memberikan imbalan pada si agen (Hendriksen, 2001). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Potensi masalah yang muncul dalam teori agensi yaitu adanya asimetri informasi.

Anggraini (2006) menjelaskan bahwa Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Dalam perbankan syariah, teori agensi diimplementasikan dengan menggunakan *good corporate governance* pada perusahaan. Teori *agency* dalam penelitian ini akan diteliti pada variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah dan jumlah anggota dewan pengawas syariah.

2.1.3 Teori Stakeholder

Teori Stakeholder (*stakeholder theory*) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri,

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Definisi *stakeholder* telah berubah secara substansial selama empat dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts, 1992). Teori ini mendasari perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapannya dalam pelaporan tahunan. Dalam penelitian ini teori stakeholder diterapkan dalam variabel profitabilitas dan *leverage*, dua variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang kepentingan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility

2.1.4.1 Konsep Corporate Social Responsibility

Mathews (1995) dalam Widiawati (2012) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai

social disclosure, corporate social reporting, social accounting. Di Indonesia, konsep CSR diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan berlakunya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 UU Perseroan Terbatas. Muatan materi CSR yang diatur dalam UU PT Pasal 74 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL.

Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai TJSL secara lebih ringkas atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Sedangkan pada pasal 4 dijelaskan bahwa berkenaan dengan alokasi dana pelaksanaan program CSR merupakan biaya perusahaan yang program kerja dan anggarannya terlebih dahulu diajukan oleh direksi untuk mendapat persetujuan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Di negara Malaysia menurut Lo dan Yap (2011), pasca-krisis tahun 1998, Malaysia membentuk *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG)

untuk menangani masalah yang berkaitan dengan transparansi perusahaan, akuntabilitas, dan CSR. Ruth Yap pada <http://www.env.go.jp/earth/coop/eco-csrjapan/en/malaysia.html> menjelaskan bahwa pada tahun 2007, diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk mengungkapkan kegiatan atau praktik CSR mereka. Ide CSR ini didorong lebih jauh karena pemerintah memperkenalkan insentif pajak untuk bisnis yang melaksanakan program CSR secara luas. Pemerintah juga telah membentuk dana sebesar RM50 juta untuk mempromosikan kegiatan CSR dan mengumumkan bahwa di masa yang akan datang masuknya CSR dalam dana investasi milik negara akan menjadi kriteria untuk investasi masa depan. Bisnis yang menerapkan praktek CSR secara baik akan mendapat apresiasi dari pemerintah dengan mendapatkan penghargaan 'Perdana Menteri CSR Awards' pada tiap akhir tahun mulai dari tahun 2008. Langkah-langkah pemerintah Malaysia ini telah memfasilitasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi CSR sebagai bagian dari strategi dan nilai-nilai inti perusahaan mereka.

Corporate Social Responsibility menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Widiawati (2012) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya

mencarilaba untuk pemegang saham seperti yang dinyatakan oleh Gray *et al* (2001) dalam Yulfaida (2012).

World Business Council for Sustainable Development's(2008) dalam Purwitasari (2011) menjelaskan CSR sebagai

“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

CSR dianggap sebagai komitmen yang berkelanjutan dari kegiatan bisnis untuk berperilaku secara etis. Diharapkan CSR dapat memberi kontribusi dan meningkatkan taraf hidup lingkungannya. Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR secara umum, yaitu bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan untuk memberi umpan balik atas aktivitasnya pada lingkungan sosial.

2.1.4.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Safitri (2012) menjelaskan bahwa peraturan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai ketentuan informasi finansial dan nonfinansial yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi tersebut (Guthrie dan Mathews, 1985). Menurut Deegan (2002) terdapat berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, yaitu :

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
- b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi, atas dasar alasan ini, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan

bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini dipandang sebagai motivasi utama.

- c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, yaitu manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari dalam memperoleh informasi dan manajer tidak peduli akan *cost* yang dibutuhkan untuk menyajikan informasi tersebut.
- d. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen resiko, menginginkan agar manajer memberikan informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial serta lingkungan secara periodik.
- e. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas refleksi dari “kontrak sosial” tergantung pada penyediaan informasi yang berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
- f. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
- g. Untuk dapat mengatur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
- h. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
- i. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menjelaskan alasan perusahaan mengungkapkan informasi sosial. Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang

dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial.

Pelaporan CSR merupakan sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan internal karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di seluruh aspek tanggung jawab perusahaan. Pengungkapan CSR ini dapat digunakan untuk mengukur nilai dari hubungan jangka panjang dan aset (Vurro dan Perrini, 2011).

2.1.4.3 *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam

Kamla, *et al.* (2006) dalam Purwitasari (2011) menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam merupakan kecintaan terhadap alam dan orang-orang (diri sendiri dan orang lain) dan kesadaran akan pentingnya mengambil tindakan yang beralasan dalam menjaga keseimbangan ini. Pada hakikatnya prinsip-prinsip Islam merupakan panduan untuk dapat mencapai tujuan dengan jalan yang baik dan seimbang.

Dalam konteks Islam, tanggung jawab sosial individu yang berasal dari firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan dari perbuatan dan ucapan (Sunah) nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk perusahaan. Tujuan utama dari bisnis syariah adalah untuk memenuhi kehendak Allah, melalui Al-Qur'an dan Sunah. Islam menganggap bekerja adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Wajar bagi perusahaan untuk bertujuan mencapai keuntungan, akan tetapi tujuan ini harus dikejar menurut Syariah. Syariah mendefinisikan norma-norma perilaku manusia dan tata cara perusahaan dalam berurusan dengan

lingkungan eksternal. Bisnis yang mengaku mematuhi syariah harus lebih jelas tentang peran mereka dalam masyarakat. Kerangka hubungan sosial yang mendasari perspektif Islam pada pelaporan sosial adalah pemahaman tentang konsep akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan yang penting untuk hubungan sosial (Maali *et al.*, 2006).

2.1.5 *Good Corporate Governance*

Dalam kata pengantar untuk laporan Forum Tata Kelola Perusahaan Global, Claessens (2003) dalam Khan (2010) menyatakan bahwa dalam arti luas, *corporate governance* dihubungkan dengan memegang keseimbangan antara ekonomi dan tujuan sosial dan antara tujuan individu dan komunal. Oleh karena itu, adanya kerangka tata kelola dapat mendorong penggunaan sumber daya yang sama dan efisien untuk meminta pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat (Khan, 2010).

Penerapan *good corporate governance* berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini menurut Anggraini (2006) karena adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR berkaitan dengan praktik *good corporate governance*. Bahkan, standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan tata kelola perusahaan untuk memasukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya standar tanggung jawab sosial perusahaan dalam standar tata kelola AAOIFI yaitu Standar Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Islam No 7: Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan pada Lembaga Keuangan Islam. Dalam menentukan struktur tata kelola perusahaan yang sesuai untuk lembaga keuangan Islam harus dipertimbangkan masalah hukum Islam serta prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam (Percy dan Stewart, 2010).

2.2 Penelitian terdahulu

Farook (2008) menekankan bahwa *Islamic Financial Institutions* dimaksudkan untuk bertanggung jawab secara sosial untuk dua alasan yang saling terkait yaitu status mereka sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kewajiban keagamaan dan posisi mereka sebagai teladan intermediasi keuangan. Hasan dan Hassan (2011) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan dan syaria'ah adalah salah satu topik yang paling penting dalam keuangan Islam baru-baru ini. Suara tata kelola perusahaan, terutama dalam paradigma Islam, sangat penting karena cenderung untuk mendorong kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di antara semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Sementara itu, pemerintahan syariah sangat kental dengan sistem

keuangan Islam dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan dari pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya bahwa semua transaksi dan praktik kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peneliti sebelumnya mendapatkan hasil yang bermacam-macam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengacu pada penelitian *Farook et al.* (2011) yang telah dimodifikasi. Hasil yang diperoleh pada penelitian *Farook et al.*(2011) adalah bahwa tekanan politik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Rasio penduduk muslim di suatu negara berpengaruh positif, *Islamic governance score* berpengaruh positif, dan *Investments Account Holders* persentase pemegang saham berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah. Rizkiningsih (2012) melakukan penelitian yang sama dan mendapati hasil yang sama. Ia menambahkan variabel *leveraged* dan profitabilitas dalam penelitiannya.

Percy dan Stewart (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengungkapan zakat di bank syariah Indonesia dan Malaysia masih sangat rendah. Meskipun begitu, Malaysia melakukan praktik pengungkapan CSR dengan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Di antara faktor-faktor yang diidentifikasi keterkaitannya dengan pengungkapan yang terkait Dewan Pengawas Syariah adalah Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan lintas-anggota dari Dewan Pengawas Syariah.

Hasil penelitian yang diperoleh Sembiring (2005) dalam meneliti tingkat pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris

memiliki pengaruh positif yang signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi profitabilitas dan *leverage* gagal untuk menunjukkan efek yang signifikan. Anggraini (2006) menggunakan kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas sebagai variabel independen dalam meneliti pengungkapan CSR. Hasil yang diperoleh adalah hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi karena sudah ditetapkan dalam PSAK 57. Kepemilikan manajemen dan jenis industri dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial akuntansi.

Suryono (2011) melakukan hal yang hampir sama dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainability report*. Variabel independen yang digunakan adalah karakteristik perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, *leverage*, tingkat aktivitas perusahaan) dan praktik CG (komite audit, dewan direksi dan *governance committee*). Dari penelitian ini diperoleh hasil ada perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan untuk perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dan yang tidak mengungkapkan.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Farook (2011), Rizkiningsih (2012) menyatakan bahwa tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap bank syariah untuk melakukan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan Untoro (2013) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, namun proporsi dewan direktur independen, ukuran komite audit, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Secara lebih ringkas, hasil penelitian terdahulu akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian (tahun)	Alat Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Farook <i>et al.</i> (2011)	<i>Ordinary Least Squares</i>	Variabel dependen : Pengungkapan CSR (CSRDIS) Variabel independen : tingkat kebebasan politik dan sosial, Rasio penduduk muslim di suatu negara, <i>Islamic governance score</i> , Proporsi <i>Investment Account Holders</i>	Menurut hasil regresi, variasi yang terbaik dijelaskan oleh variabel pengaruh publik yang relevan dan mekanisme tata kelola syariah (Dewan Pengawas Syariah) . Menggunakan ukuran variabel alternatif, hasil regresi menunjukkan bahwa 'tingkat kebebasan politik dan sosial' dan proporsi <i>Investment Account Holders</i> juga penentu yang signifikan dari pengungkapan CSR pada bank Islam.
Percy dan Stewart (2010)	<i>content analysis method</i> dan <i>The Spearman's rank order test</i>	Variabel dependen : Laporan <i>Shari'ah Supervisory Board Index</i> , <i>Shari'ah Supervisory Board Disclosure Index</i> , <i>Zakat Disclosure Index</i> Variabel independen : Ukuran dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, Sarjana terkemuka dan berpengalaman di	Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan (dalam bentuk pengungkapan Dewan Pengawas Syariah dan pengungkapan zakat) masih terbatas. Diantara faktor-faktor yang diidentifikasi keterkaitannya dengan pengungkapan yang terkait Dewan

		Dewan Pengawas Syariah	Pengawas Syariah adalah Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan lintas-anggota dari Dewan Pengawas Syariah.
Sembiring (2005)	Regresi Berganda	Variabel dependen : <i>CSR disclosure</i> Variabel independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, profil, ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i>	ukuran perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi profitabilitas dan <i>leverage</i> gagal untuk menunjukkan efek yang signifikan
Anggraini (2006)	Regresi berganda	Variabel dependen : <i>CSR disclosure</i> Variabel independen : kepemilikan manajemen, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas	Hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi karena sudah ditetapkan dalam PSAK 57. Kepemilikan manajemen dan jenis industri dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial akuntansi.
Suryono (2011)	<i>Multivariate Binary Logistic Regression</i>	Variabel dependen : sustainability report Variabel Independen : Karakteristik perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, <i>leverage</i> , tingkat aktivitas perusahaan) dan praktik CG (komite audit, dewan direksi)	ada perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan untuk perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dan yang tidak

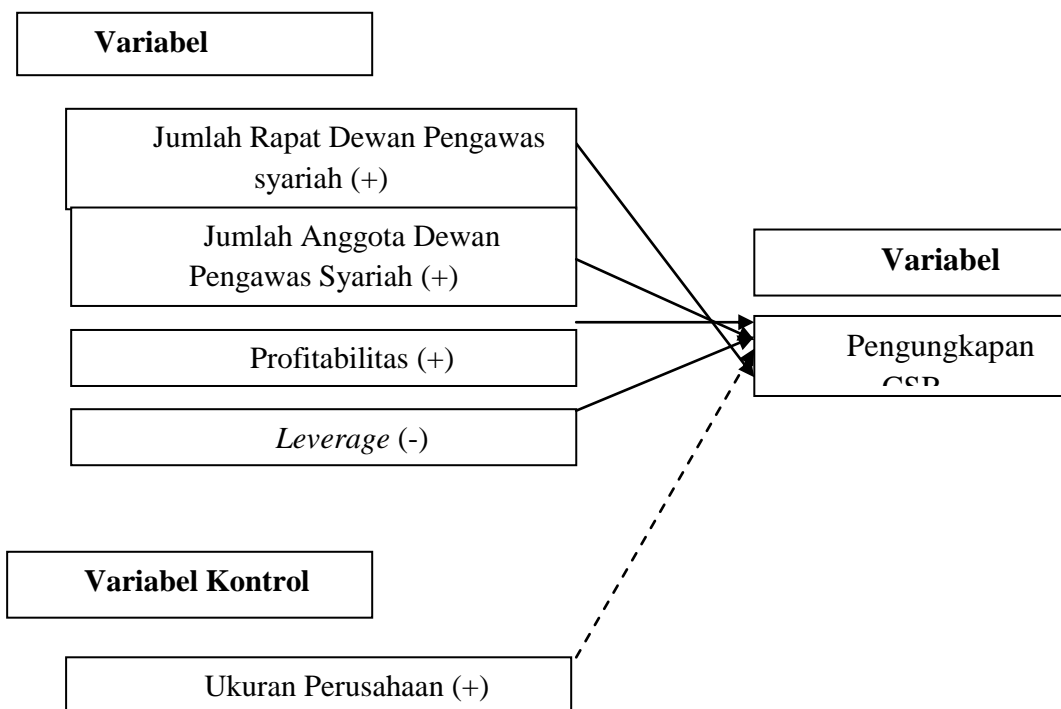
		dan governance committee)	mengungkapkan
Rizkiningsih (2012)	Regresi berganda	Variabel dependen : <i>Islamic Social Reporting</i> Variabel independen : tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>Islamic governance score</i>	tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap bank syariah untuk melakukan <i>Islamic Social Reporting</i> .
Dwi Arini Untoro (2013)	Regresi berganda	Variabel Dependen : Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Variabel independen : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit Variabel Kontrol: <i>Firm Size</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas	ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan (size) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, namun proporsi dewan direktur independen, ukuran komite audit, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, selain menggunakan variabel dependen dan variabel independen juga digunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variabelindependen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Gray dan Nowland (2012) menyatakan bahwa kehadiran direktur pada rapat direksi dan komite penting bagi direksi dan pemegang saham. Menghadiri pertemuan adalah sarana utama bagi direksi untuk mengakuisisi perusahaan, berinteraksi dengan anggota dewan lainnya dan memberikan saran kepada manajemen. Sedangkan Suryono (2011) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi

perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Charles (2012) menyatakan bahwa apabila komite audit semakin *intens* untuk melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun akan semakin efektif. Pada penelitian terdahulu, belum pernah diteliti variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR.

H1 = Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

2.4.2 Pengaruh Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Maali *et al.*(2006), selain memberikan kegiatan investasi dan pembiayaan untuk muslim yang tertarik mematuhi hukum Islam dalam transaksi bisnis mereka, bank syariah menawarkan klien mereka berbagai produk keuangan yang tidak melanggar Syariah. Selain mengikuti praktik akuntansi bank secara normal, bank Islam akan menerapkan praktik yang didasarkan pada putusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Farook (2011) menyatakan bahwa DPS diharapkan dapat mewakili hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih daripada manajemen. Peningkatan jumlah anggota DPS mungkin mengarah ke tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi lebih terkontrol.

Percy dan Stewart (2010) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah bisa dibagi antara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu untuk fokus pada pelaporan perusahaan. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan perspektif dan pengalaman yang beragam dapat mengakibatkan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum syariah pada pelaporan perusahaan. Hal tersebut meliputi aspek-aspek pengungkapan tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H2 = Jumlah Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati (2012), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan

terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Suryono (2011) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap *Sustainability Report* (SR). Ia menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor.

H3 = Profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi seperti yang dinyatakan oleh Hadiningsih (2007) dalam Suryono (2011). Beberapa peneliti mendapatkan hasil yang berbeda dalam menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Anggraini (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi

dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Suryono (2011), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan. Artinya *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi para stakeholder. Para stakeholder perusahaan, akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) agar kinerja keuangannya menjadi bagus. Dari dasar penelitian Belkaoui dan Karpik tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 = *Leverage* memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono, 2011). Anggraini (2006) menjelaskan bahwa

perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dsb. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang lebih luas.

H5 = Ukuran Perusahaan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai cara penelitian ini dilaksanakan. Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi, sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Untuk selanjutnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau *CSR disclosure* dalam pengolahan data akan dilambangkan dengan CSRDIS.

Dalam beberapa penelitian CSR konvensional, indeks yang dipakai untuk mengukur pengungkapan CSR adalah GRI (*Global Reporting Initiatives*). Dalam Standart GRI (2006) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator Hak

Asasi Manusia, 8 Indikator kemasyarakatan dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Berbeda dengan penelitian CSR konvensional, CSRDIS dalam penelitian ini diukur dengan mengacu pada indeks yang digunakan dalam penelitian Maali *et al.* (2003). Indeks penelitian yang digunakan adalah indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim. Terdapat 32 aspek pengungkapan yang dikelompokkan menjadi 9 kategori. Sembilan kategori dari indeks yang dikembangkan Maali *et al.* (2003) adalah :

- a. Opini syariah untuk transaksi yang haram
- b. Zakat (Bank diwajibkan membayar)
- c. Zakat (Bank tidak diwajibkan untuk membayar)
- d. Qardul Hassan (pinjaman kebajikan)
- e. Kegiatan-kegiatan amal dan sosial
- f. Karyawan
- g. Pembayaran terlambat dan klien bangkrut
- h. Lingkungan
- i. Aspek lain dari keterlibatan masyarakat

Secara lebih lengkap mengenai aspek-aspek dalam indeks indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran B. Hal utama yang membedakan kedua indeks ini adalah pada prinsip Islam yang diterapkan dalam indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim. Prinsip Islam ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan ekonomi.

Cara menghitung pengungkapan CSR dengan indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim dalam penelitian ini adalah dengan memberi nilai 1 untuk aspek yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak sesuai yang dijelaskan Maali *et al.* (2003).

$$\text{CSRDIS} = \frac{\text{ASPEK YANG TERPENUHI}}{\text{TOTAL ASPEK}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel Independen

Sekaran (2006) mendefinisikan variabel independen (bebas) sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (MEET)

Dengan adanya frekuensi rapat yang baik maka diharapkan dapat menghasilkan pengungkapan CSR yang baik pula. Jumlah rapat dewan pengawas syariah merupakan salah satu aspek dalam terciptanya *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Gray dan Nowland (2012) menyatakan bahwa kehadiran direktur pada rapat direksi dan komite penting bagi direksi dan pemegang saham. Menghadiri pertemuan adalah sarana utama bagi direksi untuk mengakuisisi perusahaan, berinteraksi dengan anggota dewan lainnya dan memberikan saran kepada manajemen. MEET dihitung dari jumlah total rapat dewan pengawas syariah.

2. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (SSB)

Dewan pengawas syariah diharapkan dapat mengawasi perbankan syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu perwujudan dari

prinsip-prinsip syariah tersebut adalah dengan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan perbankan. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Jumlah DPS akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam melakukan pengungkapan terhadap CSR. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka dihipotesiskan akan semakin luas pengungkapan CSR karena mendapat dukungan dan tuntutan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini, jumlah Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan tersebut.

3. Profitabilitas (PROFIT)

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karenanya, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan (*Return on Asset*) ROA seperti penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008).

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Total asset}}$$

4. *Leverage*

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* dihitung menggunakan *debt equity ratio* (DER) seperti yang digunakan dalam penelitian Anggraini (2006).

$$DER = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Tujuan pemakaian variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian, sehingga hasil penelitian dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol. SIZE akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan seperti yang diterapkan dalam penelitian Farook *et al.* (2011).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2003). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling*

adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Merupakan bank syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Menyajikan komponen laporan tahunannya secara lengkap pada tahun 2010-2012.
3. Laporan tahunan bank dapat diperoleh dari situs *Bloomberg* dan *website* bank.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia periode tahun 2010-2012 yang dapat diunduh dari *website* resminya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Secara umum terdapat dua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari pencatatan sumber atau publikasi lain (data sekunder). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang

diperoleh dari sumber data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia periode tahun 2010-2012.

b. Studi pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pengujian data untuk menguji dan mengolah data yang akan dianalisis. Pengujian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis. Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 16 sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *software* SmartPLS 2.0

3.5.1 Analisis Deskriptif

Pengertian analisis deskriptif menurut Winkonadi dalam winkonadi.wordpress.com adalah suatu cara menggambarkan persoalan yang berdasarkan data yang dimiliki yakni dengan cara menata data tersebut sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data, dijelaskan dan berguna untuk keperluan selanjutnya. Jadi dalam hal ini terdapat aktivitas atau proses pengumpulan data, dan pengolahan data berdasarkan tujuannya.

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menganalisa statistik deskriptif dari data yang telah diolah. Ghazali (2011) menjelaskan bahwa statistik deskriptif

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian lebih dari satu maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara pengungkapan CSR pada laporan perbankan syariah dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\rightarrow \text{CSRDIS} = \alpha + \beta_1 \text{MEET} + \beta_2 \text{SSB} + \beta_3 \text{PROFIT} + \beta_4 \text{LEV} + \beta_5 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan :

CSRDIS = pengungkapan *corporate social responsibility*

β_1 MEET = jumlah rapat dewan pengawas syariah

β_2 SSB = jumlah dewan pengawas syariah.

β_3 PROFIT = profitabilitas

β_4 LEV = *leverage*

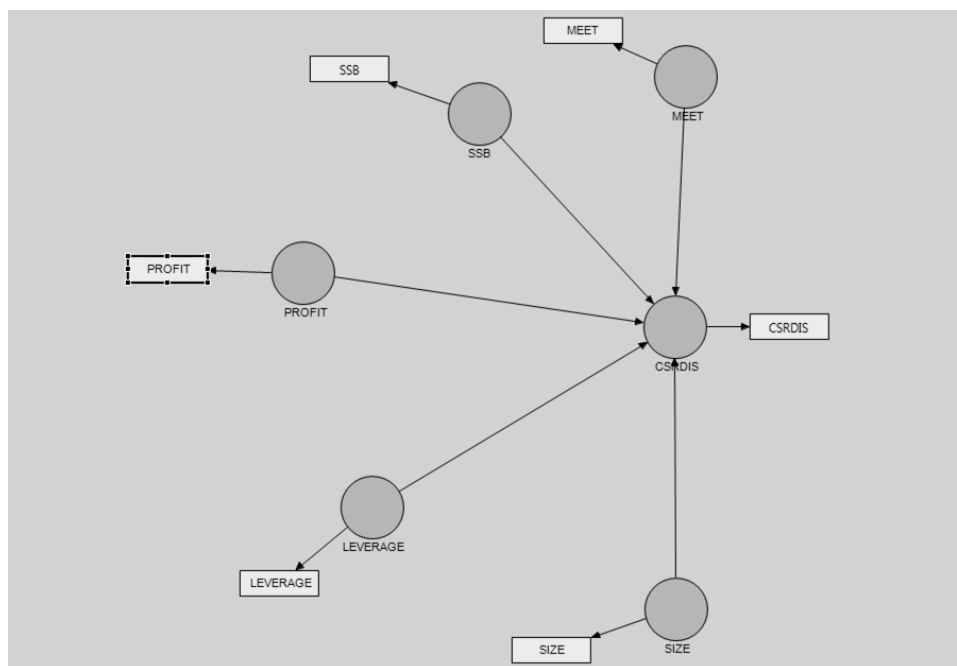
β_5 SIZE = ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol

Variabel-variabel dalam penelitian ini dianalisis menggunakan software SmartPLS 2.0. PLS merupakan kependekan dari *Partial Least Square*. Analisis regresi *Partial Least Square* didesain khusus untuk mengatasi masalah-masalah dalam regresi berganda seperti jumlah pengamatan terbatas, banyaknya data yang hilang, dan korelasi antar variabel independen tinggi. Dalam penelitian ini, PLS

digunakan dengan pertimbangan karena populasi data yang diteliti terbatas yaitu berjumlah total 36 laporan keuangan.

Gambar 3.1

Rancangan Model Struktural



Sumber: Data yang telah diolah

PLS dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan *multiple indikator*. Ghozali (2008) menyatakan bahwa pendekatan PLS adalah *distribution free* (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio). PLS merupakan faktor *indeterminacy* metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil.

Untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok. Dengan pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* adalah *variance* yang berguna

untuk dijelaskan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator maka menghindarkan masalah *indeterminacy* dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor. Wold (1982) dalam Ghazali (2008) menyatakan bahwa PLS memberikan model umum yang meliputi teknik korelasi kanonikal, *redundancy analysis*, regresi berganda, *multivariate analysis of variance* (MANOVA) dan *principle component analysis*.

Oleh karena PLS menggunakan iterasi algoritma yang terdiri dari seri analisis *ordinary least squares* maka persoalan identifikasi model tidak menjadi masalah untuk model recursive, juga tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala ukuran variabel. Lebih jauh lagi menurut Ghazali (2008), jumlah sampel kecil dengan perkiraan kasar yaitu :

1. Sepuluh kali skala dengan jumlah terbesar dari indikator (kausal) formatif (catatan skala untuk konstruk yang didesain dengan refleksif indikator dapat diabaikan)
2. Sepuluh kali dari jumlah terbesar *structural path* yang diarahkan pada konstruk tertentu dalam model struktural.

PLS bertujuan membantu peneliti mendapatkan nilai variabel untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah

residual variance dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator) diminimumkan.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu *weight estimate*, *path estimate* dan yang ketiga adalah *means* dan lokasi (konstanta). Untuk memperoleh estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama merupakan jantung dari algoritma PLS yang berisi prosedur iterasi yang selalu akan menghasilkan *weight estimate* yang stabil. Komponen skor *estimate* untuk setiap variabel laten didapat dengan dua cara. Melalui *outside* aproksimasi yang menggambarkan *weighted agregat* dari indikator kontruk dan melalui *inside* aproksimasi yang merupakan *weighted agregat component score* lainnya yang berhubungan dengan konstruk dalam model teoritis.

2. Tahap kedua

Setelah skor variabel laten diestimasi dalam tahap satu, maka hubungan jalur (*path relation*) kemudian diestimasi dengan *ordinary least square* pada tahap dua. Setiap variabel dependen dalam model (apakah variabel laten endogen atau indikator dalam model refleksif) dilakukan regresi terhadap variabel independen (variabel laten lainnya atau indikator dalam bentuk formatif).

3. Tahap ketiga

Jika hasil estimasi pada tahap dua menghasilkan nilai yang berarti (perbedaan nilai *means*, skala, dan *variance* memberikan hasil yang berarti), maka

parameter *mean* dan lokasi untuk indikator dan variabel laten diestimasi pada pihak ketiga.

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2008), oleh karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non-parametrik. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indikator*. Sedangkan *outer model* dengan formatif indikator dievaluasi berdasarkan pada *substantive contentnya* yaitu dengan membandingkan besarnya *relative weight* dan melihat signifikansi dari ukuran *weight* tersebut. Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat nilai R^2 untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q squares test* (Stone, 1974; Geisser 1975) dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur *bootstrapping*. Menurut Hair *et al.* (1998) batas keamanan untuk residual adalah $\pm 1,96$ dengan tingkat signifikansi 5%.

Penelitian ini menggunakan model indikator formatif. Konstruk dengan indikator formatif mempunyai karakteristik memiliki beberapa ukuran komposit yang digunakan dalam literatur ekonomi. Pada pandangan yang lebih kontemporer memungkinkan adanya *multiple* pengukuran (*multiple indicator*) $x_i, (i= 1, 2, \dots, n)$. Suatu konsep diasumsikan merupakan fungsi dari pengukuran atau indikatornya

seperti dinyatakan Bagozzi dan Fornel (1982) dalam Ghazali (2008). Pada model formatif, komposit faktor (variabel laten) dipengaruhi atau ditentukan oleh indikatornya. Jadi, arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten. Model formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh konstruk tetapi mengasumsikan bahwa semua indikator mempengaruhi *single* konstruk. Pada model ini juga berasumsi bahwa tidak ada hubungan korelasi antar indikator. Oleh karena diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi maka ukuran internal konsistensi reliabilitas (*cronbach alpha*) tidak diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif. Secara ringkas, langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengujian menggunakan PLS adalah sebagai berikut:

1. Merancang model struktural (*inner model*)
2. Menyusun model pengukuran (*outer model*)
3. Mengubah diagram alur menjadi persamaan struktural
4. Melakukan estimasi parameter
5. Pengujian model struktural (*inner model*)

Hasil uji regresi berganda menggunakan SmartPLS dinilai dengan menggunakan kriteria yang diajukan oleh Chin (1998) sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian PLS

Kriteria	Penjelasan
Evaluasi Model Struktural	
R ² untuk variabel laten endogen	R ² sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah”
Estimasi koefisien jalur	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat

	diperoleh dengan prosedur <i>bootstrapping</i> .
f^2 untuk <i>effect size</i>	Nilai f^2 sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium atau besar pada tingkat struktural.
Relevansi prediksi Q^2 dan q^2	$Q^2 > 0$
Evaluasi Model Pengukuran Formatif	
Signifikansi nilai weight	Nilai estimasi untuk model pengukuran formatif harus signifikan. Tingkat signifikansi ini dinilai dengan prosedur <i>bootstrapping</i> .
Multikolinieritas	Variabel manifest dalam blok harus diuji apakah terdapat multikolinieritas. Data yang baik adalah yang tidak terdapat multikolinieritas sehingga VIF < 10

Sumber : Chin (1998) dalam Ghazali (2008)